









lingkungan yang lestari juga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.

3. Kebijakan kantong plastik berbayar tidak bertentangan dengan tujuan syara' dan hukum yang sudah ditetapkan oleh nash. Dalam kebijakan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (*hifdzu al-nafs*) karena pencemaran sampah plastik yang tertimbun dan sulit terurai dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan sebuah aturan pemerintah yang tidak diatur dalam dalil al-quran maupun hadis. Namun, tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk mengurangi pencemaran sampah yang sesuai dengan kemaslahatan kalangan umum.

Maksud dari tujuan kebijakan tersebut juga tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam kebijakan tersebut terdapat sebuah tujuan yang melindungi jiwa (*hifdzu al-nafs*). Karena pencemaran sampah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang juga membahayakan kehidupan makhluk hidup.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberlakukan kantong plastik berbayar tidak hanya disambut positif oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan dana yang terkumpul dari hasil penjualan kantong plastik. Dalam surat edaran nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 sudah disepakati bahwa harga kantong plastik berbayar minimal sebesar 200



dinilai tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam pengurangan sampah kantong plastik.

Melihat dari kondisi masyarakat yang ada, masalah yang terkandung dalam kebijakan kantong plastik berbayar berupaya mencari jalan keluar dengan konsekuensi mendatangkan manfaat dan mengurangi madharat yakni mengurangi pencemaran kantong plastik, meskipun masih ada yang tetap merasa dirugikan. Setidaknya, ini tidak menyebabkan kerugian yang fatal bagi kedua belah pihak. Selain dukungan dari masyarakat, pemerintah juga harus segera membuat kepastian hukum yang ditetapkan dalam peraturan menteri sehingga dapat dijalankan dan diakui oleh semua pihak yang bersangkutan. Karena pada dasarnya pemerintah yang harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan negara.